

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS KEBOCORAN DATA PADA APLIKASI PEDULILINDUNGI

Esterisya Cornelia Chandraditya

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Coronavirus Disease 2019 atau disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang berasal dari Kota Wuhan yang berada di China pada Desember tahun 2019. Penyakit ini sangat mudah menular hanya dengan percikan dari saluran pernapasan yang dihasilkan oleh batuk, bersin dan mudah menempel pada benda yang disentuh oleh penderita covid-19. Indonesia termasuk dalam angka penularan yang tinggi, sehingga Pemerintah meluncurkan sebuah Aplikasi yang dirancang untuk melawan Pandemi Covid sebagai media penyebaran Informasi mengingat kemajuan Teknologi Informasi sangat berkembang pesat. Namun, Aplikasi ini membuka peluang pencurian data pribadi akibat lemahnya keamanan. Hal ini muncul ketika Sertifikat Vaksin Presiden Indonesia yang tersebar di Media Internet dimana Sertifikat Vaksin tersebut, terdapat data yang seharusnya terlindungi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah dalam menangani kasus kebocoran data pribadi pengguna pada Aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan metode statute approach dan conceptual approach. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah wajib menjaga keamanan data pribadi masyarakat dan memahami hak pengguna sesuai ketentuan yang berlaku. Jika suatu saat ditemukan korban kebocoran data pada Aplikasi PeduliLindungi yang mengalami kerugian atau dibuikan tanpa persetujuan maka ia dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Pemerintah wajib mempertimbangkan gugatan masyarakat yang dirugikan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi kasus tersebut.

Kata Kunci: Aplikasi PeduliLindungi, Kebocoran Data, Sertifikat Vaksin, Covid-19

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS KEBOCORAN DATA PADA APLIKASI PEDULILINDUNGI

Esterisya Cornelia Chandraditya

Faculty of Law

Advisors:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Coronavirus Disease 2019 or called Covid-19 is an infectious disease originating from the city of Wuhan in China in December 2019. This disease is very easily transmitted only by splashes from the respiratory tract produced by coughing, sneezing and easily sticking to objects touched by the infected person. Covid-19 sufferers. Indonesia is included in a high transmission rate, so the Government launched an application designed to fight the Covid Pandemic as a medium for disseminating information considering that the progress of Information Technology is growing rapidly. However, this application opens up opportunities for personal data theft due to weak security. This occurs when the Presidential Vaccine Certificate of the Indonesian President is spread on the Internet media where the Vaccine Certificate is, there is data that should be protected. Therefore, this study aims to determine the authority of the Government in handling cases of leakage of user's personal data on the PeduliLindung application. This study uses the statute approach and conceptual approach. From the legal research that has been carried out, it can be concluded that the Government is obliged to maintain the security of the public's personal data and understand the rights of users in accordance with applicable regulations. If at any time it is found that the victim of a data leak on the Cares for Protection Application who has suffered losses or is imprisoned without consent, he or she can file a claim for compensation to the court. The government is obliged to consider the claims of the aggrieved community as a form of government responsibility in dealing with the case.

Keywords: *Aplikasi PeduliLindungi, Kebocoran Data, Sertifikat Vaksin, Covid-19*